

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belt and Road Initiative (BRI) adalah kebijakan luar negeri dan strategi pembangunan serta kerangka kerja sama yang diluncurkan pada tahun 2013 oleh presiden Xi Jinping (Traverso, 2022). Tiongkok menjadikan BRI sebagai agenda utama ekspansi strategis di tingkat global. Skema BRI bertujuan untuk membangun kembali Jalur Sutra lama yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia, Eropa, dan wilayah sekitarnya melalui investasi infrastruktur dalam jumlah besar untuk jalan raya dan transportasi (Lorenzo Tondo, 2023). Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Green Finance and Development Center, Fudan International School of Finance* (FISF) Fudan University di Shanghai, China, per desember 2023 tercatat ada 150 negara yang menandatangani MoU kerjasama BRI. Program BRI juga menyoal negara-negara Eropa, terdapat 34 negara Eropa dan Asia Tengah, dan diantaranya terdapat 17 negara Uni Eropa yang menandatangani MoU, termasuk Italia yang bergabung di tahun 2019 (Nedopil, 2023).

Dalam kebijakan luar negerinya pada 1 Maret 2019, Italia menandatangani program BRI dengan Tiongkok, yang mengejutkan banyak negara Barat, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Italia adalah satu-satunya anggota G7 yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerangka kerjasama BRI dengan Tiongkok yang ditandatangani oleh kedua negara selama kunjungan kenegaraan Presiden Xi Jinping ke Italia pada bulan Maret 2019 (Andornino, 2023b). Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah Italia mengalami resesi tiga kali dalam satu dekade/ 10 tahun, ditambah dampak Covid-19 juga memperburuk perekonomian Italia (De Maio, 2020). AS dan UE telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi Italia. Namun Italia skeptis masih merasa diabaikan oleh AS karena krisis di Libya ketika Italia mengalami krisis keuangan

global pada tahun 2008, dan merasa ditinggalkan oleh Eropa karena krisis imigrasi dan ekonomi. Kehadiran Tiongkok berada di waktu yang tepat bagi Italia yang membutuhkan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang menjadi prioritas Italia (Federiga Bindi, 2019).

Menurut Casarini (2019) ekonom Italia dan pakar Tiongkok Michele Geraci memuji MoU yang ditandatangani kedua negara sebagai “*win-win* untuk Italia, seluruh Eropa dan Tiongkok”. Presiden Xi Jinping memanfaatkan dukungan Italia terhadap inisiatif kebijakan luar negerinya untuk mengurangi negara-negara Barat “berkomplot” melawan Tiongkok, dengan harapan bahwa negara-negara penting Uni Eropa lainnya mengikuti jejak Italia dalam menandatangani MoU kerjasama BRI. Didukung lagi oleh pemerintah Italia yang pada saat itu dikuasai oleh sayap kiri populis yang skeptis terhadap Uni Eropa, dipimpin oleh Perdana Menteri Giuseppe Conte yang sangat ingin beralih ke Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan investasinya. Conte menganggap partisipasi dalam BRI sebagai peluang bersejarah bagi Italia, dan percaya langkah itu membantu kedua negara memanfaatkan potensi yang lebih besar (Atkins et al., 2023).

Dalam perjalanannya Italia bergabung ke dalam BRI ada perbedaan pandangan yang berlawanan antara politisi yang menjabat pada saat itu terhadap BRI sehingga mempengaruhi kebijakan yang diterapkan. Perjanjian MoU BRI dengan Tiongkok diterima dan ditandatangani pada Maret 2019 oleh Perdana Menteri Giuseppe Conte yang berasal dari partai sayap kiri yaitu partai M5S (*Movement 5 Stelle*) yang cenderung mendukung kebebasan ekonomi dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk Tiongkok. Conte melihat BRI Tiongkok sebagai proyek yang memiliki potensi untuk meningkatkan konektivitas dan kemajuan ekonomi Italia. Namun pada tanggal 6 Desember 2023, di bawah pemerintahan Perdana Menteri baru yaitu Giorgia Meloni Italia resmi menarik diri dari kerjasama BRI dengan tidak lagi memperbarui nota kesepahaman (MoU) mengenai partisipasi formalnya dalam BRI dengan Tiongkok (Mazocco, 2023).

Berbeda dengan Giuseppe Conte saat menjabat sebagai perdana menteri, Giorgia Meloni perdana menteri baru yang berasal dari partai FDI (*Fratelli*

d'Italia) berhaluan sayap kanan memiliki pandangan lebih kritis terhadap BRI Tiongkok, melihat proyek tersebut sebagai upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya secara global. Isu penarikan Italia dari BRI telah lama dibahas dan disinggung jauh sebelumnya yakni pada tahun 2022 saat Meloni berkampanye, Meloni mengatakan bahwa kepatuhan Italia terhadap BRI adalah sebuah 'kesalahan' (Bhattarai, 2019). Semestinya dalam hubungan kerjasama BRI antara Italia dengan Tiongkok dapat menjalin hubungan bekerjasama dengan suka rela dan memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua belah pihak, berdasarkan apa yang tertulis didalam (MoU, 2019) yaitu tujuan MoU adalah untuk menyeimbangkan kembali hubungan perdagangan yang tidak seimbang. Mengingat semangat Italia dalam menandatangani MoU BRI dengan harapan memperoleh keuntungan, namun ditengah perjalanan Italia memutuskan untuk menarik diri kerjasama BRI. Menurut Insisa Aurelio (2023) menteri luar negeri Italia Antonio Tajani menyatakan selama empat tahun partisipasi Italia di BRI, tidak ada perubahan maupun manfaat ekonomi yang diharapkan Italia

Pemerintahan koalisi konservatif yang dipimpin oleh Giorgia Meloni tidak hanya fokus pada kekecewaan ekonomi akibat perjanjian tersebut, namun juga secara konsisten berusaha menunjukkan komitmennya terhadap NATO. Meloni mengkritik perlakuan Tiongkok terhadap etnis minoritas Xinjiang, penanganan krisis COVID-19, peran Tiongkok dalam menciptakan peningkatan ketegangan di selat Taiwan dan sikap Tiongkok terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengubah realitas geopolitik dunia. Negara-negara Barat, khususnya Eropa mulai memikirkan akibat perubahan tatanan dunia. Ambisi Tiongkok untuk mewujudkan tatanan dunia baru dengan mitra juniornya Rusia, sangat mengkhawatirkan para pembuat kebijakan di Eropa. Mitra dagang tradisional Italia seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, memandang BRI sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Di tengah perubahan realitas dalam politik internasional, Italia berupaya untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan penting (Tocci & Goretti, 2023).

Meloni berupaya menyelaraskan negaranya dengan negara-negara Barat, Italia membentuk kembali tujuan kebijakan luar negerinya dan mempertahankan kemitraan penting dengan negara-negara Barat. Kunjungan resmi Meloni ke AS pada Juli 2022 membantu mendukung pendirian tegasnya untuk hengkang dari BRI (Zulfikar U, 2023). Meloni mengumumkan bahwa Italia berniat keluar dari BRI, dan resmi keluar pada tanggal 6 Desember 2023. Namun prosesnya memakan waktu yang lama, Italia sengaja mengulur waktu hingga KTT G20 di India, dan memilih suasana multilateral untuk pengumuman karena untuk menghindari retaliasi dari Tiongkok. Seperti yang terjadi sebelumnya ketika kantor perwakilan Taiwan dibuka di Vilnius, Lituania pada November 2021. Tiongkok membalas terhadap Lituania dengan menghentikan semua impor dari Lituania dan bahkan melarang beberapa barang Jerman yang mengandung komponen Lituania. Kemudian contoh yang lain adalah yang terjadi di Australia, ketika perdana menteri Scott Morrison mendukung penyelidikan tentang asal-usul Covid-19 pada awal tahun 2020, sehingga membuat Tiongkok marah. Setelah itu Tiongkok mulai mengenakan tarif yang sangat tinggi terhadap beberapa ekspor Australia. Dengan latar belakang seperti itu, Meloni berusaha membatasi politisasi keputusannya untuk meninggalkan BRI, dengan membiarkan pintu terbuka untuk jenis perjanjian lain dengan Tiongkok namun tidak dibawah kerjasama BRI sehingga dirasa tidak terlalu merugikan Tiongkok. Adanya kekhawatiran Italia akan dampak ekonomi jangka panjang dari keterlibatan proyek BRI, menyebabkan Italia meninjau kembali langkah kebijakannya dalam hubungannya dengan BRI Tiongkok (Alessia A, 2019).

Seperti semua MoU yang ditandatangani Tiongkok dengan negara-negara lain, perjanjian ini tidak disusun sebagai pakta ekonomi perdagangan, melainkan menyatakan kesediaan umum negara penanda tangan untuk bekerjasama dibawah kerangka BRI. Perjanjian Kerjasama BRI antara Italia dan Tiongkok memiliki jangka waktu awal 5 tahun, dan perjanjian tersebut akan diperpanjang secara otomatis setiap 5 tahun kedepan. Itu berarti kedua negara akan terus bekerjasama, kecuali salah satu pihak memutuskan untuk membatalkannya dengan memberitahu pihak lainnya pada 3 bulan sebelumnya. Italia bergabung dalam BRI sejak Maret

2019, yang semestinya berakhir di 5 tahun pertama pada Maret 2024, namun Italia memutuskan mengumumkan penarikan dirinya 3 bulan sebelum masa perjanjian berakhir (MoU, 2019). Italia mengakhiri hubungan kerjasama BRI menggunakan jalur diplomatik resmi dengan mengirimkan surat resmi kepada Tiongkok. Surat tersebut berisi penjelasan mengenai evaluasi ulang atas manfaat ekonomi dan partisipasi dalam BRI (Mazocco, 2023) .

Kebijakan Italia dalam memutus hubungan kerjasama BRI dengan Tiongkok tentunya memiliki potensi sebab atau faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga Italia mengeluarkan kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas dapat diketahui rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengapa Italia mengeluarkan kebijakan menarik diri dari kerjasama BRI, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas yaitu mengenai perubahan kebijakan Italia dalam menjalani hubungan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yaitu program kerjasama BRI yang telah berlangsung sejak tahun 2019 dengan kesepakatan penandatanganan MoU oleh kedua negara. Namun ditengah perjalanannya, Italia memutuskan untuk menarik diri dari kerjasama program BRI tersebut. Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa Italia memutuskan untuk mengubah kebijakannya. Dalam pengambilan kebijakan luar negeri tentunya ada beberapa faktor dan alasan yang mendorong Italia untuk memutuskan keluar dari kerjasama ekonomi terbesar tersebut.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni berfokus pada perubahan kebijakan Italia dalam memutus hubungan kerjasama BRI dengan Tiongkok dalam periode waktu 2019-2023. Penelitian ini berfokus secara eksklusif pada Italia, tanpa membahas secara mendetail perubahan kebijakan negara-negara Eropa lainnya terkait BRI. Meskipun demikian, perbandingan singkat dengan negara-negara lain juga dilakukan untuk konteks tambahan. Analisis juga dibatasi

pada penggunaan teori Internal setting (seperti kondisi ekonomi, dinamika politik internal) dan External setting (seperti geopolitik dan tekanan internasional).

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Italia dalam mengubah kebijakan terhadap pemutusan kerjasama dengan Tiongkok dalam proyek Belt and Road Initiative?”**.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan Italia terhadap pemutusan kerjasama dengan Tiongkok dalam proyek BRI.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan kemampuan peneliti dalam menyusun skripsi di dalam bidang Hubungan Internasional.
2. Memperkaya dan mengembangkan khasanah literatur Hubungan Internasional
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan masukan untuk keperluan referensi akademis bagi yang berminat mengadakan penelitian lanjutan untuk masalah yang sama.
4. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.